

























ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena satu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberituannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau Orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat seperti yang diperlukan, antarlain:

- a) Surat persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul. Surat keterangan mengenai orang tua.
- c) Surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan. (Model Na).
- d) Surat izin kawin dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHAKAM atau PANGAB Bagi calon mempelai anggota ABRI.
- e) Surat kutipan buku pendaftaran talak/cerai atau surat talak/cerai jika calon mempelai seorang janda atau duda.





Menurut pasal 11 ayat 2 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan dianggap lebih tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan bagi yang beragama Islam juga wali atau yang mewakilinya. Dan pada pasal 11 ayat (3) dijelaskan bahwa dengan pencatatan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi .

Selanjutnya dapat dijelaskan melalui skema tentang alur-alur pendaftaran pernikahan dibawah ini:



